



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. IQBAL HADI
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK : 522887

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.500.000.000
1. Tanah Seluas 4.500 m2 di KAB / KOTA TANAH DATAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
2. Tanah Seluas 252 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	264.000.000
1. MOBIL, MITSUBITSI COLT-T120SS PICK UP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. MOTOR, BEAT BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	25.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	16.537.755
F. HARTA LAINNYA	Rp.	498.000.000
Sub Total	Rp.	2.304.037.755
III. HUTANG	Rp.	1.190.298.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.113.739.755

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.